

## ABSTRAK

### PROBLEMATIKA PEMBERITAHUAN HAPUSNYA JAMINAN FIDUSIA (STUDI SOSIO LEGAL TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DI PONTIANAK KALIMANTAN BARAT)

Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 telah menegaskan bahwa setiap benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, demikian pula apabila jaminan fidusia hapus atau berakhir karena pelunasan oleh Pemberi Fidusia (Debitur) maka Penerima Fidusia (Kreditur) wajib memberitahukan secara tertulis hapusnya jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Namun dalam praktik, kewajiban untuk memberitahukan hapusnya jaminan fidusia tersebut ternyata belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, hal mana akan berakibat hukum terhadap status benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Demikian permasalahan dalam penulisan tesis ini dengan judul "Problematika Pemberitahuan Hapusnya Jaminan Fidusia (Studi Sosio Legal Terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia di Pontianak Kalimantan Barat)". Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia milik Pemberi Fidusia yang pinjaman hutangnya (perjanjian pokok) telah dibayar lunas dan status benda Jaminan Fidusia milik Pemberi Fidusia yang tidak dilakukan penghapusan/pencoretan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris/sosio legal, yaitu penelitian yang pada awalnya dilakukan terhadap data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap kenyataan yang ada dalam masyarakat. Implementasinya bertujuan untuk mendeskripsikan suatu kegiatan atau peristiwa dalam praktik, kemudian seluruh data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik pelaksanaannya, dikaitkan dengan teori-teori hukum. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa kewajiban Penerima Fidusia memberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia ternyata belum dilaksanakan sepenuhnya atau sebagaimana mestinya, sedangkan untuk status benda jaminan fidusia milik Pemberi Fidusia yang tidak dilakukan penghapusan/pencoretan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, ternyata tidak berakibat hukum apapun, hanya berdampak administratif bagi Kantor Pendaftaran Fidusia.

**Kata kunci** : *Pemberitahuan hapusnya Jaminan Fidusia, Status objek Jaminan Fidusia yang tidak dilakukan penghapusan/pencoretan.*

## ABSTRACT

### PROBLEMS OF THE TERMINATION NOTICE FIDUCIARY (SOCIO-LEGAL STUDIES AGAINST THE LAW NO. 42 YEAR 1999 ON FIDUCIARY IN PONTIANAK KALIMANTAN BARAT)

Fiduciary Law No. 42 of 1999 in conjunction with the Government Regulation No. 86 of 2000 have confirmed that every object burdened with fiduciary shall be registered with the Registry Office fiduciary, as well as when fiduciary delete or expire due to repayment by the Giver of Fiduciary (Debtor) then Fiduciary Recipient (Creditor) shall notify in writing the abolishment of fiduciary fiduciary Registration Office. But in practice, the obligation to notify the abolishment of fiduciary was not implemented properly, where it will result in legal action against the status object becomes the object of fiduciary. Thus the problem in this thesis with the title "Problems of the Termination Notice Fiduciary (Socio-Legal Studies Against the Law No. 42 Year 1999 on Fiduciary in Pontianak Kalimantan Barat)". The purpose of the study was to determine the discharge Receiver Fiduciary notify Fiduciary Registration Office concerning the abolition of fiduciary fiduciary loans owned Giver debt (principal agreement) has been paid in full and the status of objects belonging to the Giver fiduciary fiduciary not done deletion/deletion by fiduciary Registration Office. This study uses empirical juridical/socio-legal, the research was initially conducted on secondary data to then proceed with the study of primary data in the field or to the fact that there is in society. Implementation aims to describe an activity or event in the practice, then all the data were analyzed by descriptive analysis, which describe the legislation in force and implementation practices, associated with legal theories. Based on the results of the study, the authors obtained the answers to the problems that exist, that the fiduciary obligation Recipient shall notify in writing to the Office of the Register of Fiduciary on Fiduciary voidance was not implemented properly, while the status of objects belonging to the Giver of fiduciary Fiduciary not done deletion/deletion by the Office Fiduciary registration, it did not result in any legal, administrative impact only for Fiduciary Registration Office (because not done deletion of registration in the Register of Fiduciary and deletion of the Fiduciary Certificate).

**Keywords :** *Notification abolishment Fiduciary, objects Status Fiduciary were not done deletion/deletion.*